

URGENSI KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI DI PERPUSTAKAAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dwi Novita Ernaningsih & Amalia Nurma Dewi

Dosen Universitas Negeri Malang
dwi.novita@um.ac.id

Abstract: *Collection development policy in academic library has a significant role in developing the quality of the collection to support the academic activities of civitas academica in university. The existence and the quality parameters can be measured by the quality of the library collection is owned and utilization by users. Collection development policy is the art of analyzing the users need through communication between librarian with the users and stakeholders. Collection development policy is a policy carried out by the library to meet the needs of users according to subject area, in which there is a process of communication with the population of the community which served and with funders (Evans, 2005: 50). This article will discuss about the importance of communication in the implementation of the collection development policy at Postgraduate Academic Library in State Univesity of Malang. The purpose of this study to find out how the implementation of policies and constraints faced in the implementation of the policy. This study used a qualitative approach with case study method. Data were collected by interview, observation and document analysis. The result shows thatthe librarian can not establish good communication with stakeholders that include leader as a funder and users as utilizzer of the library collection. Implementation of collection development policy has not been able to synergize the various interests and needs of the libraries and stakeholders so that the implementation of existing policies can not be effective and efficient.*

Keywords: *collection development policy, communication, stakeholders, academic library*

Abstrak: *Kebijakan pengembangan koleksi dalam perpustakaan akademik mempunyai peran yang signifikan dalam mengembangkan kualitas koleksi untuk mendukung kegiatan akademik sivitas akademika di perguruan tinggi. Eksistensi dan parameter kualitas perpustakaan dapat diukur dari kualitas koleksi yang dimiliki dan ketermanfaatannya bagi pemustaka. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan seni untuk menganalisis kebutuhan pemustaka melalui komunikasi antara pihak pemustaka dengan stakeholders. Kebijakan pengembangan koleksi*

merupakan kebijakan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka sesuai dengan subject area, di dalamnya terjadi proses komunikasi dengan populasi masyarakat yang dilayani maupun dengan penyandang dana (Evans, 2005: 50). Artikel ini akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan PPs UM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah pustakawan belum dapat membangun komunikasi yang baik dengan stakeholders yang meliputi pihak pimpinan sebagai penyandang dana dan pemustaka sebagai pemanfaat koleksi perpustakaan. Implementasi kebijakan pengembangan koleksi belum dapat mensinergikan berbagai kepentingan maupun kebutuhan dari pihak perpustakaan dan stakeholders sehingga implementasi kebijakan yang ada belum bisa efektif dan efisien.

Kata kunci: *kebijakan pengembangan koleksi, komunikasi, stakeholders, perpustakaan perguruan tinggi*

A. Pendahuluan

Semua jenis perpustakaan, termasuk perpustakaan perguruan tinggi memerlukan suatu kebijakan dalam pengembangan koleksi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan arah yang jelas bagi pengembangan koleksi dan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam pengembangan koleksi, pustakawan harus benar-benar mengetahui tujuan perpustakaan dan mengenali siapa saja masyarakat pemustakanya, serta sumber informasi apa saja yang mereka butuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya komunikasi dengan pemustaka baik formal maupun informal, untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Selain itu diperlukan juga komunikasi dengan penyandang dana untuk memberikan dukungan finansial dalam mengembangkan koleksi, menyediakan jasa, sumber informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh pemustaka sesuai dengan tujuan dari pengembangan koleksi itu sendiri.

Secara umum ada beberapa tujuan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan yaitu sebagai pedoman dalam memberikan arah yang jelas untuk menyediakan koleksi yang berkualitas, berdaya guna bagi pemustaka, serta dapat memanfaatkan dana pengadaan secara efektif dan efisien. Berdasarkan tujuan tersebut, eksistensi dan parameter kualitas perpustakaan dapat diukur

dari kualitas koleksi yang dimiliki dan ketermanfaatannya bagi pemustaka. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua faktor yang mempengaruhi pengembangan koleksi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi budaya organisasi perpustakaan, sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya informasi dan sumberdaya manusia, dana, dan fasilitas fisik lainnya. Faktor eksternal meliputi kebijakan *stakeholders* (pemangku kebijakan), keadaan ekonomi dan dukungan finansial, lingkungan akademis, serta perilaku informasi masyarakat yang dilayani.

Di perpustakaan perguruan tinggi pengembangan koleksi harus memperhatikan berbagai prinsip dalam pengembangan koleksi seperti relevansi, berorientasi pada kebutuhan pemustaka, kelengkapan, kemutakhiran dan kerjasama. Semua prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan komunikasi yang efektif. Koleksi perpustakaan perguruan tinggi hendaknya relevan dengan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang mengacu pada jenis dan jenjang pendidikan, termasuk jumlah dan besar fakultas, jurusan dan program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Pengembangan koleksi perpustakaan perguruan tinggi harus berorientasi pada kebutuhan pemustaka yang terdiri dari dosen, peneliti, tenaga administrasi, mahasiswa, maupun alumni yang masing-masing memiliki tingkat kebutuhan berbeda-beda. Oleh karena itu koleksi yang tersedia di perpustakaan harus variatif, tidak hanya terdiri dari buku ajar atau materi perkuliahan saja tetapi juga dilengkapi dengan koleksi meliputi bidang ilmu yang berkaitan dengan program studi yang ada. Perpustakaan harus selalu menjaga kemutakhiran sumber-sumber informasi yang tersedia sesuai dengan kurikulum, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pengembangan koleksi perpustakaan perguruan tinggi perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait baik dengan dosen, mahasiswa, maupun perpustakaan lain agar kegiatan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kerjasama dengan dosen dan mahasiswa dilakukan dalam menentukan koleksi-koleksi apa saja yang mereka butuhkan, sedangkan kerjasama dengan perpustakaan lain bisa dilakukan dengan cara pinjam antar perpustakaan (*interlibrary loan*) maupun tukar-menukar, sehingga jika di perpustakaan yang bersangkutan tidak memiliki koleksi yang dibutuhkan oleh pemustaka, maka pemustaka dapat dirujuk ke perpustakaan lain yang diajak bekerjasama untuk mendapatkan koleksi yang diinginkan.

Prinsip pengembangan koleksi tersebut di atas akan sulit untuk diwujudkan jika perpustakaan belum mampu membangun komunikasi yang efektif dengan *stakeholders*. Komunikasi yang efektif menjadikan perpustakaan mempunyai pemahaman mendalam (*insight*) terkait dengan kebutuhan informasi masyarakat yang dilayani, sehingga perpustakaan mampu menyediakan koleksi yang relevan, lengkap, dan mutakhir. Selain itu, komunikasi yang efektif juga mampu membuka peluang kerjasama informasi dengan berbagai pusat informasi lainnya.

Pengembangan koleksi di perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Malang dilakukan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ada dan disepakati. Kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan ini masih belum dituangkan secara tertulis, dan dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi salah satu permasalahan pokok adalah komunikasi internal maupun eksternal.

Artikel ini menganalisis komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan koleksi yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut Perpustakaan PPs UM) serta permasalahan-permasalahan yang terjadi di sana.

B. Kebijakan Pengembangan Koleksi

Kebijakan pengembangan koleksi adalah kebijakan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka sesuai dengan *subject area*, ada komunikasi dengan populasi masyarakat yang dilayani, maupun dengan penyandang dana¹. Kebijakan pengembangan koleksi berbeda dengan kebijakan seleksi dan akuisisi. Dalam kebijakan pengembangan koleksi, adanya proses dan mekanisme komunikasi dengan masyarakat yang dilayani dan penyandang dana memberikan nilai plus yang membedakannya dengan kebijakan seleksi dan kebijakan akuisisi.

Kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan berfungsi sebagai:

1. Pedoman bagi selektor;
2. Sarana komunikasi: memberitahu pemakai mengenai cakupan dan ciri-ciri koleksi yang telah ada dan rencana pengembangannya;
3. Sarana perencanaan baik perencanaan anggaran maupun pengembangan koleksi;
4. Membantu menetapkan metode penilaian bahan;
5. Membantu memilih metode pengadaan;
6. Membantu menghadapi masalah sensor;
7. Membantu perencanaan kerjasama;
- 8.

¹ Evans, G. Edward. *Developing Library and Information Collection*. (US: Libraries Unlimited, 2012), 50

Membantu identifikasi bahan yang perlu dipindahkan ke gudang atau dikeluarkan dari koleksi (evaluasi).

Prinsip pengembangan koleksi terdiri dari: 1. Prinsip Relevansi, yaitu semua koleksi perpustakaan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pemustaka, relevan dengan visi dan misi lembaga induknya, serta kurikulum yang diberlakukannya; 2. Prinsip Kelengkapan, yaitu koleksi perpustakaan diupayakan selengkap mungkin, koleksi tidak hanya bidang ilmu pengetahuan ilmiah, namun juga menyediakan koleksi untuk rekreasi yang berguna untuk pengembangan bakat, minat dari pemustaka yang dilayani; 3. Prinsip Kemutakhiran yaitu koleksi perpustakaan sekolah diupayakan yang terbaru (*up to date*) yang bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan kesesuaian; 4. Prinsip Kerjasama, tidak ada di dunia ini sebuah perpustakaan yang mengklaim perpustakaan paling lengkap, olehkarena itu perpustakaan perlu bekerja sama antar dengan perpustakaan lain, agar kebutuhan pemustaka akan informasi dapat dipenuhi. Kerjasama tidak hanya dengan antar perpustakaan tapi juga dengan pihak lain, misalnya toko buku, agen buku, donator, sponsor dan seterusnya².

Adapun kegiatan pengembangan koleksi meliputi: 1. Seleksi bahan pustaka; 2. Pengadaan Bahan pustaka; 3. Inventarisasi bahan pustaka; 4. Penyiangan; 5. Evaluasi.³ Semua kegiatan tersebut akan dijabarkan di sub bab pembahasan, yang menjelaskan bagaimana proses atau kegiatan pengembangan koleksi di Perpustakaan PPs UM.

C. Komunikasi dalam Pengembangan Koleksi

Komunikasi adalah mengirim dan menerima informasi diantara dua orang atau lebih. Informasi yang dikirim dan diterima bisa berupa fakta, ide, konsep, pendapat, keyakinan, perilaku, instruksi, dan bahkan emosi⁴. Kegiatan komunikasi tidak selalu berjalan lancar, seringkali pesan tidak sampai seluruhnya, bahkan kadang-kadang dapat dikatakan tidak terjadi komunikasi atau ada kegagalan komunikasi.

Semua unsur komunikasi, yang terdiri dari pengirim, informasi atau pesan, dan penerima berpotensi untuk menimbulkan gangguan

² Pastine, Maureen (ed), *Collection Development Past and Future*.(London : Routledge,2013),144

³ Evans, G. Edward. *Developing Library and Information Center Collection*. 5th ed. (London: Libraries Unlimited, 2005)

⁴ Manjula. H.S, *ICT in Education*. (Raleigh : Lulu Publication, 2015),1

komunikasi. Selain unsur komunikasi, gangguan komunikasi juga bisa terjadi karena kondisi lingkungan sosial dimana pengirim dan penerima berada, yang menyebabkan perbedaan budaya dan pemahaman.

Gangguan komunikasi dalam kebijakan pengembangan koleksi harus diminimalisir semaksimal mungkin agar tujuan diimplementasikannya kebijakan pengembangan koleksi bisa tercapai. Posisi komunikasi menjadi lebih krusial ketika kebijakan pengembangan koleksi belum tertuang secara tertulis.⁵ Dengan belum dituangkannya kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis, otomatis kebijakan tersebut hanya dikomunikasikan secara lisan antara pihak perpustakaan dengan *stakeholder* tanpa ada dokumentasi secara tertulis.

D. Pembahasan

Kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan PPs UM tidak dituangkan secara tertulis, namun ada pustakawan yang diberi wewenang dan tanggungjawab dalam menangani hal tersebut. Untuk menentukan kebijakan pengembangan koleksi, pihak Perpustakaan PPs UM tidak membentuk panitia khusus tapi hanya melakukan perundingan yang menghasilkan konsensus atau kesepakatan dalam pengembangan koleksi, disinilah peran penting komunikasi dalam memproduksi kebijakan pengembangan koleksi mulai terlihat.

Pada hakekatnya kebijakan pengembangan koleksi sebaiknya tidak hanya dikomunikasikan secara lisan tetapi juga harus tertulis, karena hal tersebut dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang terjadi di kemudian hari yang berkaitan dengan konsistensi dan kontinuitas. Ketika pustakawan yang diberi wewenang tersebut pensiun atau sudah tidak lagi bekerja di perpustakaan maka secara otomatis kebijakan akan berubah-ubah karena ditangani oleh orang lain yang pola pikirnya jelas berbeda. Di samping itu dengan adanya kebijakan tertulis, perpustakaan dapat memperoleh berbagai keuntungan seperti membantu menjamin konsistensi dan kontinuitas dalam program pengembangan koleksi dan membantu pustakawan dalam seleksi bahan pustaka.

Dalam pengembangan koleksi ada beberapa tahap kegiatan yang harus dilakukan, antara lain:

⁵ Kohn, Karen C. *Collection Evaluation in Academic Libraries: practical guide for librarian*. (New York: Rowman and Littlefield. 2015),11

- Seleksi

Sebelum proses seleksi, perpustakaan melakukan analisis kebutuhan pemakai (*community analysis*) untuk mengetahui siapa segmentasi perpustakaan sehingga mendapatkan data yang akurat tentang sumber-sumber informasi yang dibutuhkan pemustaka. Di Perpustakaan PPs UM segmentasinya adalah dosen, mahasiswa, pegawai, dan alumni. Komunikasi yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memahami kebutuhan pemakainya hanya dilakukan melalui penyebaran angket, belum ada upaya yang lain. Perpustakaan menyebarkan angket pengusulan bahan pustaka kepada pemustaka baik dosen maupun mahasiswa, dibuat berdasarkan koleksi yang ditawarkan oleh penerbit melalui katalog penerbit. Setelah angket terkumpul, pustakawan membuat *coding book* dari jawaban-jawaban pemustaka, kemudian membuat desiderata berdasarkan katalog penerbit, dari daftar tersebut diperoleh prosentase prioritas kebutuhan.

Jika ditelisik lebih lanjut, komunikasi melalui angket yang dilakukan oleh perpustakaan pada tahap survei tersebut, sesungguhnya belum mampu menangkap kebutuhan informasi pemustaka yang sebenarnya, karena ada kemungkinan pemustaka tidak benar-benar memahami kebutuhan informasinya, atau pemustaka menyadari kebutuhan informasinya tetapi tidak mengisi informasi dengan sebenarnya pada angket tersebut. Kelemahan lain dari komunikasi yang dilakukan melalui penyebaran angket adalah kurangnya respon dari pemustaka. Banyak pemustaka yang tidak mengembalikan dan tidak mengisi angket yang disebarkan oleh pustakawan.

Pada tahap survei, kita bisa melihat bahwa pustakawan memiliki kecenderungan untuk “mengambil jarak” dari pemustakanya. Mereka tidak melakukan komunikasi langsung untuk mengetahui kebutuhan pemustaka, sehingga pemahaman mendalam (*insight*) terkait kebutuhan informasi pemustaka belum bisa terdeteksi secara tepat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staf perpustakaan PPs UM ditemukan fakta bahwa kecenderungan melakukan komunikasi melalui penyebaran angket/ katalog dilakukan untuk menghemat waktu, juga dikarenakan pustakawan masih merasa kurang percaya diri untuk berhadapan langsung dengan pemustakanya yang berpendidikan lebih tinggi.

Selanjutnya untuk mengetahui kebutuhan pemustaka, perpustakaan melakukan terobosan lain yaitu dengan mengirimkan katalog penerbit kepada para dosen melalui Ketua Program Studi untuk memilih buku-buku

yang diperlukan dalam kegiatan perkuliahan, sertabuku panduan akademik yang di dalamnya terdapat kurikulum dan silabus mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa, usulan pemustaka (dosen dan mahasiswa), dan usulan kaprodi. Setelah selesai memilih dengan mencentang atau melingkari judul dan pengarang yang diinginkan, para dosen mengirim balik ke perpustakaan melalui *e-mail* maupun datang langsung ke perpustakaan.

- Akuisisi atau Pengadaan

Akuisisi atau pengadaan bahan pustaka di perpustakaan PPs UM dilakukan dengan cara pembelian, hadiah, tukar-menukar, dan wajib simpan perguruan tinggi. Pembelian koleksi lebih berorientasi pada *handbook* dan buku-buku penunjang perkuliahan, serta berlangganan jurnal-jurnal tercetak. Koleksi yang dibeli sesuai dengan usulan pemustaka yaitu dosen dan mahasiswa, namun tidak semua usulan mereka dapat dibeli karena disesuaikan dengan dana yang tersedia.

Dengan menggunakan alat bantu seleksi katalog penerbit yang diperoleh dari distributor maupun *browsing* di internet, pustakawan menawarkan daftar bahan pustaka yang akan dibeli ke prodi-prodi. Setelah itu membuat ajuan ke PPU (Panitia Pengadaan Universitas) untuk mendapat persetujuan, selanjutnya PPU meneruskan ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) UM. ULP melakukan pembelian melalui distributor maupun toko buku sesuai dengan alokasi dana yang tersedia.

Sumber dana pembelian bahan pustaka berasal dari dana universitas yang tercantum dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan dana hibah kompetisi yang diperoleh universitas atau fakultas. Berdasarkan pedoman perpustakaan perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Dikti, dinyatakan bahwa perpustakaan perguruan tinggi wajib menyediakan 80% dari bacaan wajib mata kuliah yang ditawarkan di perguruan tinggi. Masing-masing judul bahan bacaan tersebut disediakan tiga eksemplar untuk tiap seratus mahasiswa. Namun realitasnya di Perpustakaan PPs UM belum dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan alasan keterbatasan dana. Sesuai dengan data statistik yang ada dapat diketahui bahwa koleksi yang dimiliki Perpustakaan PPs UM sejak berdirinya tahun 1990 sampai sekarang hanya mencapai 9.536 judul 18.032 eksemplar. Koleksi tersebut mayoritas tahun terbitnya antara tahun delapan puluhan hingga sembilan puluhan, koleksi tahun dua ribu ke atas tidak sampai mencapai 10%.

Terkait dengan anggaran pengadaan koleksi, pustakawan perlu membangun komunikasi yang efektif dengan para penyandang dana.

Pustakawan harus mampu meyakinkan dan menunjukkan bahwa penganggaran dana yang diberikan untuk kegiatan pengembangan koleksi, pada nantinya akan mampu meningkatkan kualitas kegiatan akademik di Universitas Negeri Malang. Kenyataannya, pustakawan belum mampu menunjukkan eksistensi perpustakaan bagi kemajuan kegiatan akademik sehingga dana yang dianggarkan belum sesuai target pengadaan bahan pustaka yang diajukan.

Anggaran yang terbatas pada akuisisi berimplikasi pada minimnya jumlah koleksi di perpustakaan PPs UM dibandingkan dengan jumlah pemustaka yang dilayani, sehingga saat perpustakaan menerima hadiah atau melakukan tukar-menukar bahan pustaka, perpustakaan tidak mempertimbangkan relevansi koleksi tersebut. Perpustakaan lebih memperhatikan kuantitas daripada kualitas koleksi.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa belum terjalinnya komunikasi yang baik antara pustakawan dengan pemustaka dan penyandang dana berimplikasi pada kegiatan pengembangan koleksi menjadi tidak efektif. Komunikasi dengan pemustaka yang belum terbangun dengan baik menyebabkan pembelian bahan pustaka kurang tepat sasaran yaitu tidak dapat mengakomodir kebutuhan pemustaka, *lobbying* pustakawan kepada penyandang dana yang belum optimal, menyebabkan anggaran pengembangan koleksi yang diturunkan menjadi terbatas. Dengan kondisi tersebut, maka kegiatan pengembangan koleksi di Perpustakaan PPs UM secara kualitas dan kuantitasnya menjadi belum mampu mendukung kegiatan akademik secara maksimal.

Menurut salah satu pustakawan Perpustakaan PPs UM, dalam hati mereka sebenarnya malu kepada pemustaka, karena kondisi koleksi perpustakaan yang memprihatinkan, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan kebijakan dan birokrasi yang ada. Hal ini berpengaruh pada menurunnya kualitas perpustakaan terutama dalam hal ketersediaan koleksi banyak yang sudah tidak mutakhir dan tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka.

Dalam pengadaan bahan pustaka, hadiah juga menjadi masalah bagi perpustakaan, karena Perpustakaan PPs UM menerima begitu saja semua hadiah berupa koleksi dari perpustakaan lain tanpa melakukan seleksi dan memperhatikan relevansi, skala prioritas, dan kemutakhirannya. Hal tersebut menimbulkan terjadinya kemubaziran, koleksi hadiah menjadi tidak terpakai dan memenuhi ruangan yang seharusnya menjadi *space* bagi koleksi lain yang lebih bermanfaat. Disamping itu juga kerja pustakawan menjadi tidak efisien dan efektif, staf perpustakaan yang seharusnya melakukan pekerjaan lain yang lebih penting, waktunya menjadi tersita karena harus mengolah koleksi

tersebut yang pada akhirnya tidak digunakan oleh pemustaka karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Padahal untuk mengolah dan menyajikan koleksi hadiah tersebut membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit, tapi ternyata koleksinya sia-sia karena tidak digunakan oleh pemustaka.

- *Penyiangan (Weeding)*

Penyiangan adalah sebuah praktik pemindahan terhadap kelebihan simpanan jumlah buku, buku-buku yang jarang sekali digunakan, dan bahan-bahan yang tidak lagi digunakan. Penyiangan merupakan pola kebijakan yang dilakukan untuk menyeimbangkan koleksi baik kualitas maupun kuantitas yang dilakukan secara berkala (setahun sekali atau sesuai kebijakan masing-masing perpustakaan).

Menurut Evans (2005) ada empat tujuan penyiangan, yaitu: 1) Memperoleh tambahan tempat (*shelf space*) untuk koleksi yang baru; 2) Membuat koleksi dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang akurat, relevan, up to date, serta menarik; 3) Memberikan kemudahan pada pemustaka dalam menggunakan koleksi; 4) Memungkinkan staf perpustakaan mengelola secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan wawancara dengan pustakawan bernama Prameswari, penyiangan di Perpustakaan PPs UM belum pernah dilakukan sehingga secara teknis menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan seperti semakin sempitnya ruang perpustakaan yang penuh sesak dengan koleksi, keterbatasan rak, kesulitan dalam perawatan koleksi, dan sebagainya. Meskipun pihak perpustakaan sudah menyampaikan permasalahannya kepada pimpinan namun hal tersebut kurang mendapat respon dari pihak pimpinan dan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi.

Penyiangan tidak pernah dilakukan di perpustakaan PPs UM karena berbenturan dengan kebijakan Asisten Direktur I PPs yang melarang perpustakaan untuk melakukan penyiangan dan discards dengan alasan setiap koleksi memiliki nilai informasi sehingga tidak boleh dibuang. Memang ada dilemma dalam hal ini bagi pustakawan, di satu pihak ingin mempreservasi koleksi yang ada tanpa harus melakukan penyiangan, tapi di satu pihak jika tidak dilakukan penyiangan maka ruang perpustakaan yang kurang luas akan semakin sempit karena penuh dengan koleksi dan mengurangi *space* bagi pengguna sehingga mengganggu kenyamanan pengguna. Bisa dibayangkan, bagaimana jika tidak dilakukan penyiangan karena setiap setengah tahun perpustakaan menerima koleksi karya ilmiah yang dikumpulkan oleh mahasiswa yang telah lulus, maka jika tidak dilakukan penyiangan atau digitalisasi dalam jangka waktu

lima sampai sepuluh tahun perpustakaan akan penuh sesak dengan koleksi tersebut yang notabene secara fisik tebal-tebal.

- Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kegiatan pengembangan koleksi agar arah dan tujuannya sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan baik oleh pemustaka, pihak perpustakaan maupun institusi. Evaluasi terhadap pengembangan koleksi seharusnya tidak hanya menyangkut segi kuantitas saja, tapi juga harus mencakup kualitas. Hasil evaluasi dapat dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan terutama dalam pengadaan koleksi yang merujuk pada visi dan misi universitas. Melalui evaluasi pengembangan koleksi, dapat diketahui hal-hal mana yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lagi.

Evaluasi bisa dilakukan secara intern oleh pihak perpustakaan maupun ekstern dengan menggunakan jasa konsultan yang tentunya akan memakan biaya lebih. Evaluasi di perpustakaan PPs UM dilakukan secara intern oleh pustakawan dengan cara melihat tingkat keterpakaian koleksi melalui statistik peminjaman, nilai pergantian koleksi, *space* atau ruang kosong pada rak, saran dan masukan pemustaka, dan sebagainya.

Data statistik merupakan sarana pendukung yang sangat penting untuk melakukan evaluasi. Dengan data tersebut pustakawan bisa menganalisis seberapa jauh tingkat ketermanfaatan koleksi perpustakaan, koleksi apa saja yang banyak dibutuhkan oleh pemustaka, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai data untuk menentukan langkah dalam proses pengembangan koleksi, seleksi dan akuisisi.

Berikut ini sampel data statistik peminjaman yang bisa dievaluasi dan digunakan untuk membantu pengembangan koleksi.

No.	Judul	Penerbit	Mulai	Berakhir
1	Journal Of Chemical Education	Washington, DC: American Chemical Society	2010	2011
2	Journal Of Counseling & Development	Alexandria, Virginia: American Counseling Association	2000	2011
3	The Modern Language Journal	Hoboken, New Jersey: NFMLTA	2000	2011
4	The American Biology Teacher	Reston : NABT	2000	2010
5	National Geographic	Washington, DC: National Geographic Society	2010	2011

No.	Judul	Penerbit	Mulai	Berakhir
6	Counseling Today	Alexandria, Virginia: American Counseling Association	2010	2011
7	Teaching Children Mathematics	Reston, Virginia: NCTM	2003	2011
8	Language Arts	Urbana, Illinois: NCTE	2010	2011
9	Journal of Multicultural Counseling and Development	Alexandria, Virginia: American Counseling Association	2010	2011
10	Counselor Education and Supervision	Alexandria, Virginia: American Counseling Association	2000	2011
11	Journal for Research in Mathematics Education	Reston, Virginia: NCTM	2000	2011
12	Reading Research Quarterly	Newark, Delaware: International Reading Association	2000	2010
13	Journal of Research in Science Teaching	Hoboken, New Jersey: NARST & Wiley-Balckwell	2010	2011
14	Science	Washington, DC : AAAS	2002	2010

Rekapitulasi Bahan Pustaka Yang Dipinjam Menurut Golongan Klasifikasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang Tahun: 2015

DDC	000	100	200	300	400	500	600	700	800	900	JUMLAH
BULAN											
Januari	10	35	0	128	73	71	9	0	29	11	366
Februari	7	34	2	143	67	56	3	1	22	3	338
Maret	14	24	1	135	50	32	6	0	15	10	287
April	8	9	0	88	33	26	5	1	13	4	187
Mei	1	5	0	78	33	34	1	0	8	6	166
Juni	6	14	1	58	36	14	7	0	10	5	151
Juli	4	7	0	38	18	9	0	0	3	0	79
Agustus	8	24	1	64	85	24	3	0	25	1	235
September	17	56	1	227	97	32	12	1	16	4	463
Oktober	8	7	1	21	16	0	0	0	6	7	66
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	83	215	7	980	508	298	46	3	147	51	2.338

Sumber data: Perpustakaan PPS UM

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa ketermanfaatan koleksi oleh pemustaka sangat kecil sekali untuk skala perguruan tinggi, dalam satu tahun hanya mencapai 2.338 orang peminjam dalam arti sedikit sekali ketermanfaatan koleksi yang ada di Perpustakaan PPs UM. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak kita, sedikitnya angka tersebut dikarenakan oleh faktor apa. Apakah karena pemustaka kurang tertarik dengan perpustakaan dan enggan memanfaatkan koleksi yang ada, atau karena mereka lebih banyak mengakses sumber informasi menggunakan internet, atau karena koleksi yang tersedia tidak relevan dengan kebutuhan pemakai. Semua pertanyaan ini dapat digunakan oleh pustakawan untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan, sehingga semua koleksi dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan PPs UM dapat dimanfaatkan oleh penggunaanya.

Data di atas adalah nama-nama jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan PPs UM. Sejak tahun 2000, Perpustakaan PPs UM telah melanggan jurnal-jurnal tercetak dengan subyek-subyek tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka mengacu pada program studi yang ada. Namun pembelian tersebut dihentikan sejak lima tahun yang lalu dengan alasan keterbatasan dana. Selain melalui statistik evaluasi pengembangan koleksi juga harus dilakukan dengan menganalisis komplain dari pemustaka. Ada beberapa komplain yang sering dilakukan oleh pemustakaterhadap Perpustakaan PPs UM yaitu banyak koleksi yang sudah lama dan tidak mutakhir, mengapa langganan jurnal tiba-tiba dihentikan padahal para mahasiswa pascasarjana sangat membutuhkan jurnal sebagai acuan dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah mereka dengan asumsi bahwa informasi di jurnal selalu terbaru dan mutakhir dibandingkan dengan koleksi buku yang kadang informasinya sudah *out of date*.

Selain itu juga pemustaka menginginkan tersedianya sumber informasi elektronik seperti *e-journal*, *e-book*, dan sebagainya. Selama ini Perpustakaan PPs UM hanya menyediakan *e-journal* yang dilanggan yang merupakan bantuan Dikti dengan subyek yang sangat terbatas dan tidak relevan dengan jurusan dan program studi yang ada di Pascasarjana UM. Para pemustaka kecewa karena pada saat membayar SPP, mereka merasa membayar dana yang salah satu alokasinya untuk perpustakaan namun ternyata tidak bisa mengakses informasi sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut pustakawan, komplain dari pemustaka tersebut selalu ditujukan ke perpustakaan, mereka tidak mau tahu bahwa semua hal tersebut

terkait dengan birokrasi dan kebijakan. Hal tersebut mengakibatkan para pemustaka menjadi enggan untuk berkunjung dan memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan. Berbagai faktor seperti koleksi perpustakaan banyak yang lama atau sudah *out of date*, tidak lengkap, kurang mutakhir, dan faktor ketidaknyamanan karena penuh sesak dengan koleksi yang lama sementara ruangan sempit dan kurang pencahayaan, menyebabkan pemustaka segan untuk datang ke perpustakaan.

Berbagai komplain tersebut bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Perpustakaan PPs UM melakukan perbaikan dalam pengembangan koleksi. Komunikasi dengan berbagai pihak perlu dilakukan oleh pustakawan secara intens agar dalam pengembangan koleksi perpustakaan terutama dalam hal pembuatan kebijakan bisa tepat sasaran, sehingga peran perpustakaan dalam menunjang kegiatan akademik bisa terwujud secara nyata.

E. Kesimpulan

Kebijakan pengembangan koleksi terutama di perpustakaan perguruan tinggi merupakan suatu proses yang kompleks dan di dalamnya penuh dengan berbagai macam permasalahan, karena di sana banyak pihak yang memiliki berbagai macam kepentingan. Namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pembangunan komunikasi yang efektif dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pustakawan harus selalu proaktif, melakukan gebrakan, dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang berpengaruh di universitas, hal ini dimaksudkan agar pengembangan koleksi bisa terwujud sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan.

Eksistensi dan kredibilitas perpustakaan tidak hanya diukur dari kuantitas koleksi yang tersedia, namun juga kualitas koleksi yang dimiliki. Perpustakaan dengan koleksi yang lengkap, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan pemustaka akan selalu paralel dengan tingginya tingkat keterpakaian koleksi dan tingkat kunjungan pemustaka. Dengan demikian eksistensi perpustakaan sebagai jantung perguruan tinggi yang mendukung terciptanya Tri Dharma perguruan tinggi akan dapat terwujud secara nyata.

Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya, demikian halnya dengan pengembangan koleksi. Berbagai permasalahan yang ada di Perpustakaan PPs UM mulai dari kebijakan, dana, hingga komplain dari pemustaka dapat diantisipasi dengan berbagai cara. Perpustakaan PPs UM perlu melakukan

transformasi yaitu perubahan yang bersifat struktural, secara bertahap, total, dan tidak bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula (*irreversible*). Semua hal itu berpulang kepada diri pustakawan sebagai kunci yang menentukan berkembang tidaknya perpustakaan.

Pustakawan perpustakaan PPS UM hendaknya bisa menjadi *agent of change* yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dari pemain pasif menjadi aktif dan dinamis sehingga dapat bertindak secara cerdas dalam menangani berbagai permasalahan yang ada. Berkaitan dengan kebijakan, pustakawan Pascasarjana UM harus memiliki kemampuan komunikasi terutama dalam hal *lobbying* kepada pimpinan dan pembangunan komunikasi personal, sehingga pustakawan memiliki posisi strategis dan memiliki *bargaining power* di UM. Jika pustakawan berhasil meyakinkan pimpinan universitas akan pentingnya pengembangan koleksi secara keseluruhan, maka para pimpinan tersebut secara otomatis akan respek terhadap perpustakaan dan mempermudah turunnya dana untuk pengembangan koleksi dan kebutuhan lainnya.

Disamping itu pustakawan perpustakaan PPS UM harus jeli terhadap peluang-peluang untuk mendapatkan dana secara profesional bagi pengembangan koleksi. Pustakawan harus bisa menangkap peluang baru dengan *adding-values*, *streamlining*, ekspansi, dan inovasi. Ia juga harus memiliki jiwa *entrepreneurship* sehingga dapat mencari sumber dana dari luar lembaga, dengan cara mengadakan seminar dan pelatihan-pelatihan di bidang kepustakawanan, menjalin kerjasama dengan perusahaan yang bisa menjadi sponsor, kreatif dalam kemas ulang informasi (*information repackaging*) untuk dijadikan produk yang menguntungkan, dan sebagainya. Pustakawan harus selalu meningkatkan *information skills* and *information literacy*. Pustakawan harus bisa menunjukkan potensi diri yang dimiliki dan kontribusi perpustakaan secara nyata kepada lembaga sehingga eksistensinya akan diakui dan mendapat perhatian dari pimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Belvadi, Melissa. DDA And Traditional Monograph Acquisition - The Experience Of A Small University Library. *Insights*. Vol.29.1. (Mar 2016): 64-69.
- Candace Morgan cd_df_morgan@msn.com for ALA's Law for Librarians. Revised 8.06. *Collection Development and Materials Review Policy*.
- Evans, G. Edward. *Developing Library and Information Center Collection*. 5th ed. London: Libraries Unlimited, 2005.
- Evans, G. Edward. *Developing Library and Information Collection*. (US: Libraries Unlimited, 2012), 50.
- Indonesia. Direktorat Pendidikan Tinggi. *Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Ed. 3. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
- Kohn, Karen C. *Collection Evaluation in Academic Libraries: practical guide for librarian*. (New York: Rowman and Littlefield. 2015), 11.
- Manjula. H.S, *ICT in Education*. (Raleigh: Lulu Publication, 2015), 1.
- Moin, Ahmad; Panda, K C. Impact of E-Resources on Collection Development And Library Services Of Major Research Institutes In Lucknow: A Case Study. *International Journal of Information Dissemination and Technology*. 6.2. (2016): 111-118.
- Newsum, Janice M. School Collection Development and Resource Management in Digitally Rich Environments: An Initial Literature Review. *School Libraries Worldwide*. 22.1. (Jan 2016): 97-109.
- Pastine, Maureen (ed). *Collection Development Past and Future*. (London: Routledge, 2013), 144.
- Purwono. *Manajemen Koleksi*. Yogyakarta: UIN Ilmu Perpustakaan & Informasi, 2007.